

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur-Literatur

- Abdullah, Rozali, 1994, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aditya Bakti. Dwiyatmo, Kus., 2007, *Pencemaran Lingkungan dan Penanganannya*, Yogyakarta: Citra Aji Parama.
- Amsyari, Fuad, 1986, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Basah, Sjachran, 1989, *Hukum Acara Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bedner, Adriaan W., 2010, *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Jakarta: Hu-Ma.
- Budyanto, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga.
- Danusaputro, Munadjat., 1985, *Hukum Lingkungan*, Bandung: Bina Cipta.
- Darsono, Valentinus, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Dwiyatmo B., Kus, 2007, *Pencemaran Lingkungan dan Penanganannya*, Yogyakarta: Citra Aji Parama.
- Erwin, Muhammad, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan*, Bandung: Rafika Aditama.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, Philipus M., 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim, A. Ridwan, 1998, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, Zairin, 2007, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HR., Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.R., Ridwan, 2010, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo.

- Hakim, Arman, 1992, *Pendayagunaan Hukum dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri di Kota Surabaya*, Jakarta: LIPI.
- Ibrahim, Jhony, 2005, *Teori dan Metodologi dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku II: Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kementerian Lingkungan Hidup, 2010, *Sekilas Tentang AMDAL*, Jakarta.
- Mas Achmad Santosa, 1998, *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan*, Jakarta: ICEL.
- Marbun, S.F., 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Marbun, S.F., 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Soedikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Muladi, 1999, *Demokrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam: Reformasi Hukum Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Serta Berbasis Kerakyatan; Urgensi Dan Prioritas*, Jakarta: ICEL.
- Mustofa, H.A., 2005, *Kamus Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Pramono, Edy dkk., 2003, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Purwokerto: Universitas Negeri Jenderal Soedirman.
- Raharjo, Satjipto, 1981, *Hukum Dan Masyarakat*, Jakarta: Angkasa.
- Rangkuti, Siti Sudarti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Santosa, Mas Achmad, Sulaiman N. Sembiring, 1997, *Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing)*, Jakarta: ICEL.
- Siahaan, N.H.T., 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga.
- Siahaan, N.H.T., 2008, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam.

- Sinamo, Nomensen, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan (Berbasis Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia)*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Soebechi, Dr. Imam, dkk., 2014, *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Press.
- Soemartono, R.M. Gatot P., 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Supramono, Gatot, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekamto, Soerjono, Sri Mamudji, 2001 *Penelitian Hukum Normatif (Studi Tunjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemartowo, Otto., 2001, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suharno, Edi., 2008, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Sumitro, Ronny Hanitijo, 2005, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana.
- Suparni, Niniek, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- T. Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjandra, W. Riawan, 1996, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Wahyono, Margono, Djatmiko., 2000, *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia.,* Bandung: Citra
- Wantu, Fence M., 2014, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Gorontalo: Reviva Cendikia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke IV.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011.
- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tertanggal 7 Juli 1974, Nomor: 294/k/SIP/1974.
- Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pendoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
- Putusan PTUN Denpasar NOMOR: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.
- Putusan PTUN Medan NOMOR: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.